

**DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN  
MENENGAH PERTAMA : STUDI KASUS DI SMPN 3 MATARAM**

**Putri Pertiwi<sup>1</sup>, Aura Wastinaya<sup>2</sup>, Lalu Abdul Hafiz<sup>3</sup>, Baiq Yosinta Muliani<sup>4</sup>, Nurul  
Wahyuni<sup>5</sup>**

[ppertiwi824@gmail.com](mailto:ppertiwi824@gmail.com)<sup>1</sup>, [aurawastinaya8@gmail.com](mailto:aurawastinaya8@gmail.com)<sup>2</sup>, [l.hfz1510@gmail.com](mailto:l.hfz1510@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yosintabq49@gmail.com](mailto:yosintabq49@gmail.com)<sup>4</sup>, [wahyuninurul411@gmail.com](mailto:wahyuninurul411@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan menciptakan keadilan sosial, sehingga siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan. Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di SMPN 3 Mataram. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah yang kurang terlayani. Namun, tantangan masih ada, seperti stigma terhadap sekolah "favorit" dan "non-favorit," kesenjangan dalam infrastruktur dan kualitas pengajaran, serta dampaknya terhadap motivasi belajar siswa, khususnya mereka yang ditempatkan di sekolah non-favorit. Selain itu, keragaman sosial ekonomi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memengaruhi dinamika pembelajaran di kelas.

**Kata Kunci:** Sistem Zonasi<sub>1</sub>, Kualitas Pendidikan<sub>2</sub>, SMPN 3 Mataram<sub>3</sub>, Stigma Favorit<sub>4</sub>.

**ABSTRACT**

*The zoning policy in Indonesian education aims to ensure equitable access and social justice, enabling students from diverse socioeconomic backgrounds to have equal opportunities in education. This study focuses on the impact of the zoning policy on the quality of education at SMPN 3 Mataram. Using a qualitative approach, data were collected through observations, interviews, and document analysis. The findings indicate that the policy has contributed to improving access to education, especially for students in underserved areas. However, challenges persist, such as the stigma associated with "favorite" and "non-favorite" schools, disparities in infrastructure and teaching quality, and its impact on student motivation, particularly among those assigned to non-favorite schools. Additionally, the socioeconomic diversity of students admitted through the zoning system affects classroom dynamics and learning interactions.*

**Keywords:** Zoning System<sub>1</sub>, Quality of Education<sub>2</sub>, SMPN 3 Mataram<sub>3</sub>, Favorite Stigma<sub>4</sub>.

## PENDAHULUAN

Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, di mana terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas dan kuantitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik di berbagai daerah. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis, status ekonomi, serta infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Di daerah perkotaan, misalnya, sekolah-sekolah cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau terpencil. Dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan zonasi sebagai langkah strategis untuk mendistribusikan sumber daya pendidikan secara lebih adil. Yang dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Kebijakan zonasi dalam sistem pendidikan di Indonesia muncul sebagai respons terhadap fenomena sekolah favorit yang sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Sekolah favorit biasanya memiliki reputasi baik, kualitas pengajaran yang tinggi, dan fasilitas yang memadai, sehingga menarik banyak siswa dari berbagai daerah. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana siswa dari keluarga mampu lebih mudah mendapatkan tempat di sekolah-sekolah tersebut, sementara siswa dari latar belakang ekonomi rendah sering kali terpinggirkan. Kebijakan zonasi bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara merata ke berbagai sekolah berdasarkan lokasi geografis mereka, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Pemerataan (Wahyuni et al., 2020, p. 2) pembangunan merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah negara. Dalam konteks ini, kebijakan zonasi muncul sebagai alat strategis untuk mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah secara lebih terencana. Kebijakan zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah, baik yang maju maupun yang tertinggal, mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan akses terhadap sumber daya. Dengan menerapkan zonasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut serta merancang program-program spesifik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing zona. Hal ini tidak hanya membantu dalam pemerataan pembangunan fisik tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, kebijakan zonasi juga mendukung pelestarian lingkungan dengan mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemusatan siswa berprestasi juga menjadi latar belakang dari kebijakan zonasi karena adanya kebutuhan untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, serta mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang memiliki reputasi baik dan yang kurang dikenal. Dalam konteks ini, kebijakan zonasi bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara lebih merata berdasarkan lokasi geografis, sehingga setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan menerapkan sistem zonasi, pemerintah berharap dapat mendorong sekolah-sekolah di daerah tertentu untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitasnya agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat belajar bersama dan saling berinteraksi. Dengan demikian, pemusatan siswa berprestasi tidak hanya menjadi fokus pada pencapaian akademik individu tetapi juga pada pengembangan komunitas pendidikan yang lebih seimbang dan adil.

## METODE

Kami menggunakan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020, p. 3) karena penelitian ini cocok untuk judul proyek yang kami gunakan yaitu "Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Menengah Pertama : Studi Kasus di SMPN 3 Mataram". Dengan menggunakan metode ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh sistem zonasi dari sudut pandang peserta didik, guru, atau pihak terkait lainnya. Metode kualitatif memungkinkan penelitian yang akan kami lakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam melalui wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif dapat membantu menjelaskan bagaimana latar belakang dari peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi tersebut apakah dengan zonasi atau dengan prestasi peserta didik secara keseluruhan di wilayah tertentu sehingga bisa lebih merata.



Gambar 1. Observasi langsung bersama salah satu guru PPKn di SMPN 3 Mataram

Kami memilih tempat atau lokasi penelitian yang cocok yaitu di SMPN 3 Mataram. Karena merupakan sekolah yang representatif dan memiliki populasi siswa yang cukup besar kemudian, banyak sekali suku yang ada di dalamnya ada arab, sasak, dan tionghoa yang cukup beragam dimana sekolah ini berlokasi di Ampenan yang dahulunya memiliki latar belakang tentang bekas peninggalan sejarah sehingga banyak sekali peserta didiknya hidup dari latar belakang yang berbeda-beda adapun yang berlatar belakang dari kalangan atas dan juga bawah. Selain itu juga, sekolah ini terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Disini kami menggunakan teknik observasi untuk mengamati perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian pencapaian yang diraih selama pembelajaran berlangsung. Dan juga kualitas pembelajaran di SMPN 3 Mataram yang dipengaruhi dari adanya latar belakang sosial ekonomi siswa yang masuk melalui sistem zonasi tersebut. Kami juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi dengan berbagai pihak terkait, seperti peserta didik, guru, dan staf sekolah. Dengan wawancara inilah kami memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kualitas Pendidikan setelah adanya sistem zonasi. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di SMPN 3 Mataram. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan informasi.



Gambar 2. Wawancara langsung bersama WAKASEK SMPN 3 Mataram

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi beban guru di SMPN 3 Mataram

Menurut wakasek dan salah satu guru PPKn SMPN 3 Mataram Mengenai kebijakan zonasi dari sisi beban kerja guru, kebijakan zonasi sebenarnya tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka secara langsung. Setiap guru, terlepas dari jumlah siswa di kelasnya, memiliki kewajiban mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun kebijakan zonasi memengaruhi jumlah siswa yang diterima di sekolah, beban kerja guru tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh jumlah siswa yang ada di kelasnya. Jika guru memenuhi jumlah jam pelajaran ini, maka tugas mengajarnya dianggap sesuai standar, sehingga fokus utama guru tetap pada kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa. (Risna et al., 2020, p. 3)

### B. Dampak kebijakan zonasi terhadap motivasi belajar peserta didik, khususnya peserta didik yang awalnya berencana masuk sekolah favorit namun terkendala oleh zonasi

Penerimaan siswa baru (Launuha et al., 2021, p. 2) di SMP 3 dilakukan berdasarkan beberapa jalur yang telah ditentukan oleh kebijakan pendidikan nasional. Jalur ini terdiri dari empat kategori utama:

- **Afirmasi:** Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, meskipun mereka memiliki KIP, siswa di jalur ini tetap harus berasal dari dalam zona yang ditentukan untuk sekolah tersebut. Jalur afirmasi bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi rendah juga memiliki akses ke pendidikan yang layak tanpa harus bersaing secara ketat dengan siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih baik (Madiana et al., 2022, p. 1).
- **Prestasi:** Jalur prestasi ditujukan bagi siswa yang memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam kategori ini, siswa yang memiliki prestasi tertentu, seperti nilai rapor yang tinggi atau prestasi dalam bidang olahraga dan seni, dapat mendaftar ke sekolah yang berada di luar zona tempat tinggal mereka. Artinya, kebijakan ini memberikan peluang bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang mungkin tidak berada di zona mereka, selama prestasi mereka diakui oleh sekolah tujuan.
- **Perpindahan Orang Tua:** Kategori ini diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tempat tinggal atau tempat kerja. Misalnya, jika seorang siswa berasal dari luar zona SMP 3 tetapi orang tuanya dipindahkan ke sekitar wilayah SMP 3

karena alasan pekerjaan, siswa tersebut berhak untuk mendaftar di sekolah ini, meskipun alamat di kartu keluarga belum berubah.

- **Zonasi:** Kategori terakhir adalah zonasi, di mana siswa dapat diterima berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka yang berada dalam zona yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dari berbagai daerah mendapatkan akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan terdekat. Untuk jalur ini, siswa yang berada dalam zona yang telah ditentukan dapat diterima tanpa syarat tambahan, seperti prestasi atau status ekonomi. (Liska et al., 2021, p. 3)

Di SMP 3, mayoritas siswa diterima melalui jalur zonasi dan afirmasi. Kedua jalur ini menjadi pilihan utama, terutama karena sebagian besar orang tua ingin anaknya bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Dari sisi motivasi, banyak orang tua merasa bahwa memilih sekolah terdekat dapat mengurangi biaya tambahan untuk transportasi dan memudahkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Kemudian, kebijakan zonasi di sekolah-sekolah umum dibagi menjadi dua jenis wilayah, yaitu zona tunggal dan zona irisan.

1. Zona tunggal adalah zona yang hanya terkait dengan satu sekolah saja. Misalnya, jika satu wilayah hanya memiliki satu sekolah yang menjadi pilihan untuk seluruh siswa di area tersebut, maka wilayah tersebut disebut sebagai zona tunggal. Di dalam zona tunggal, siswa tidak memiliki pilihan lain kecuali mendaftar ke sekolah yang telah ditentukan di area mereka.
2. Zona irisan adalah wilayah yang bisa menjadi area penerimaan untuk beberapa sekolah. Artinya, siswa yang tinggal di zona ini memiliki opsi untuk mendaftar di salah satu dari beberapa sekolah yang berbatasan langsung dengan wilayah mereka. SMPN 3, misalnya, memiliki zona irisan dengan SMPN 10, SMPN 13, dan SMPN 18. Ini artinya, ada beberapa wilayah yang bisa diakses oleh siswa untuk mendaftar di salah satu sekolah tersebut. Dengan adanya zona irisan, siswa dan orang tua memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih sekolah yang mungkin mereka anggap lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau preferensi pribadi.

Meski demikian, kebijakan zona irisan ini tidak selalu menguntungkan bagi semua sekolah. Misalnya, daerah Sukaraje yang menjadi bagian dari zona irisan antara SMP 3 dan SMP 13. (Pangestuti, 2021, p. 18) Banyak siswa dari daerah ini lebih memilih mendaftar ke SMP 13, meskipun mereka juga dapat mendaftar di SMP 3. Fenomena ini membuat SMP 3 mengalami tantangan dalam hal jumlah siswa yang diterima. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan, masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi preferensi orang tua dan siswa, seperti reputasi sekolah atau faktor-faktor praktis lainnya.

### **C. kebijakan zonasi mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah SMP, khususnya di daerah dengan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi**

Donasi untuk pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai sekolah, termasuk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di wilayah Mataram, terdapat perbedaan mencolok dalam kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa daerah memiliki tingkat ekonomi yang cukup tinggi, sementara yang lainnya berada dalam kategori menengah ke bawah. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana perbedaan ekonomi ini memengaruhi pilihan sekolah dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Yang dimana menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.

Misalnya, meskipun SMP 3 menerima donasi yang cukup besar, masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke atas cenderung tidak akan beralih ke sekolah

lain. Mereka biasanya merasa puas dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh SMP yang berada di tengah perkotaan atau sering disebut sekolah-sekolah dibawah pohon kenari. Keluarga-keluarga ini, yang memiliki daya beli yang lebih baik, cenderung memilih sekolah-sekolah yang dianggap memiliki reputasi baik dan fasilitas yang lebih lengkap. Sekolah-sekolah tersebut sering kali menawarkan program-program tambahan, bimbingan akademis, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bervariasi. Dengan demikian, siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih mampu mendapatkan pengalaman pendidikan yang lebih menyeluruh dan memuaskan.

Sebaliknya, bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, pilihan sekolah mereka jauh lebih terbatas. Keterbatasan finansial membuat banyak orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka di sekolah yang lebih mahal atau lebih berkualitas. Oleh karena itu, anak-anak dari keluarga dengan ekonomi yang lebih rendah sering kali bersekolah di SMP yang lebih terjangkau, meskipun kualitas pendidikan di sekolah tersebut mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Sekolah-sekolah ini sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi fasilitas fisik maupun dari segi kualitas pengajaran. Ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Dalam banyak kasus, jika ada orang tua yang merasa tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka, mereka tidak memiliki pilihan lain selain memilih sekolah yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Hal ini seringkali berujung pada situasi di mana anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Mereka mungkin terpaksa menghadapi kondisi kelas yang overcrowded, kurangnya bahan ajar, dan minimnya dukungan dari guru.

Keadaan ini menunjukkan bahwa distribusi donasi dan kualitas pendidikan di setiap sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Donasi yang mengalir ke sekolah-sekolah tertentu sering kali tidak menjangkau sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan, yang terletak di daerah dengan ekonomi rendah. Hal ini menambah ketidakadilan dalam akses pendidikan dan mempersulit siswa-siswa ini untuk bersaing di dunia pendidikan yang semakin kompetitif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program donasi dan bantuan pendidikan dapat terdistribusi secara merata ke seluruh sekolah, terutama yang berada di daerah dengan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan memberikan dukungan, baik secara finansial maupun non-finansial, kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Dengan (Yonantias, 2019, p. 3) langkah-langkah yang tepat, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan peluang yang lebih baik di masa depan. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anak, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka.

#### **D. Stigma sekolah favorit dan non-favorit di kalangan Masyarakat**

Kebijakan zonasi yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Salah satu harapannya adalah menghilangkan stigma tentang adanya sekolah favorit yang dianggap unggul serta sekolah non-favorit yang cenderung kurang diminati. Dengan menempatkan siswa berdasarkan zonasi tempat tinggal, diharapkan setiap sekolah

dapat berkembang secara merata, dan kualitas pendidikan tidak lagi berpusat pada sekolah-sekolah tertentu saja. Namun, pada kenyataannya, kebijakan zonasi ini masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tujuan tersebut, terutama dalam mengatasi persepsi masyarakat tentang sekolah-sekolah favorit dan non-favorit.

Faktanya, (Ula & Lestari, 2020, p. 11) stigma tentang sekolah favorit dan non-favorit masih sangat kuat di kalangan masyarakat. Secara umum, masyarakat masih memandang bahwa sekolah-sekolah tertentu memiliki reputasi lebih baik, baik dari segi kualitas guru, fasilitas, maupun prestasi akademis dan non-akademis. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah tersebut selalu menjadi pilihan utama bagi sebagian besar orang tua dan siswa, terutama mereka yang berasal dari kalangan atas atau keluarga yang memiliki kemampuan finansial lebih. Meskipun kebijakan zonasi telah diterapkan, banyak orang tua yang berusaha mencari cara agar anak mereka tetap dapat bersekolah di sekolah-sekolah favorit, meskipun sekolah tersebut mungkin berada di luar zona tempat tinggal mereka. Misalnya, ada sebagian orang tua yang berusaha untuk "mengakali" kebijakan zonasi dengan mencari alamat di zona yang berdekatan dengan sekolah favorit, atau bahkan memalsukan alamat domisili mereka agar dapat memenuhi syarat pendaftaran di sekolah yang diinginkan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, bahwa kebijakan zonasi sering kali tidak mampu menghalangi keinginan orang tua dari kalangan ekonomi atas untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit. Bagi mereka, kualitas pendidikan yang dianggap unggul di sekolah favorit tetap menjadi prioritas utama, meskipun harus melalui berbagai upaya agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mengurangi stigma ini seolah masih sulit tercapai karena adanya tindakan dan preferensi masyarakat yang tetap memandang sekolah favorit sebagai pilihan utama.

Selain itu, kecenderungan orang tua dari kalangan ekonomi atas untuk memilih sekolah favorit juga didorong oleh berbagai fasilitas dan dukungan yang biasanya lebih lengkap di sekolah-sekolah tersebut. Sekolah favorit umumnya memiliki fasilitas yang lebih memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang multimedia, lapangan olahraga yang baik, serta akses ke program pendidikan tambahan yang beragam. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sekolah favorit tetap dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya, sehingga banyak orang tua rela mengeluarkan biaya tambahan atau mencari cara agar anak mereka bisa diterima di sekolah tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa, walaupun zonasi sudah diberlakukan, stigma tentang sekolah favorit tetap sulit dihilangkan.

Di sisi lain, sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam kategori favorit sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi fasilitas, kualitas guru, maupun minat pendaftar. Sekolah-sekolah non-favorit ini biasanya memiliki jumlah pendaftar yang jauh lebih sedikit, dan sering kali terpaksa menerima siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah favorit, atau siswa yang memang tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan domisili atau ekonomi. Akibatnya, sekolah non-favorit cenderung diisi oleh siswa dengan motivasi yang lebih rendah atau berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kualitas antara sekolah favorit dan non-favorit semakin terlihat, dan akhirnya memperkuat stigma yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, dalam banyak kasus, sekolah favorit juga memiliki akses yang lebih besar terhadap program-program pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk alumni yang biasanya aktif memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah. Sekolah favorit sering kali memiliki jaringan alumni yang kuat dan berpengaruh, yang turut memberikan dukungan dalam bentuk dana, fasilitas, atau peluang pengembangan bagi siswa. Hal ini tidak selalu dimiliki oleh sekolah non-favorit, sehingga perbedaan dalam kualitas dan dukungan semakin terlihat. Peran alumni yang mendukung perkembangan sekolah ini secara tidak langsung semakin memperkuat status favorit pada sekolah-sekolah tertentu di mata masyarakat.

Fenomena ini juga diperkuat oleh pandangan sebagian besar masyarakat yang masih sangat memprioritaskan prestasi akademis sebagai tolok ukur kualitas pendidikan. Sekolah favorit umumnya memiliki nilai rata-rata ujian yang lebih tinggi, serta memiliki rekam jejak prestasi baik dalam kompetisi tingkat lokal maupun nasional. Orang tua dari kalangan atas yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi sering kali cenderung mencari data prestasi akademik ini sebagai pertimbangan utama dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Mereka menganggap bahwa dengan bersekolah di sekolah favorit, anak mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam karier akademik maupun non-akademik di masa depan. Dengan demikian, pandangan bahwa sekolah favorit lebih unggul dan lebih "bernilai" tetap menjadi dasar pemikiran banyak orang tua, meskipun kebijakan zonasi berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua sekolah.

Pada akhirnya, walaupun kebijakan zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan, stigma tentang sekolah favorit dan non-favorit belum sepenuhnya hilang dari kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi masih perlu disempurnakan agar mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, terutama dalam hal persepsi masyarakat yang masih mengedepankan faktor kualitas, reputasi, dan fasilitas sekolah. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam hal pembagian zonasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah non-favorit agar stigma ini benar-benar dapat berkurang, serta agar setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi di mata masyarakat.

#### **E. Dominasi positive atau negative dari kebijakan sistem zonasi**

Kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah awalnya bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan serta mengurangi stigma "sekolah favorit" yang selama ini terjadi. Dalam prinsipnya, kebijakan ini menempatkan siswa di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah tanpa harus bersaing dengan siswa dari luar daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi masalah yang muncul akibat persepsi tentang sekolah-sekolah unggulan yang dianggap lebih baik dan sekolah biasa yang kurang diminati.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan zonasi ini di lapangan tidak sepenuhnya berjalan lancar dan adil, terutama bagi sekolah yang tidak berlabel favorit atau unggulan. Dalam pengalaman di sekolah yang kami datangi yakni SMPN 3 Mataram,, kebijakan zonasi ini berdampak pada penurunan jumlah pendaftar. Karena penentuan zona sudah diatur oleh pemerintah, siswa tidak memiliki kebebasan untuk memilih sekolah di luar zona yang telah ditetapkan (Widyastuti, 2020, p. 15). Jadi, jika seseorang tinggal di dalam zona sekolah tertentu, maka secara otomatis ia akan masuk ke dalam daftar penerimaan sekolah tersebut, terlepas dari keinginan untuk bersekolah di tempat lain.

Penentuan zona ini tidak diputuskan berdasarkan pilihan siswa atau keluarganya, melainkan melalui proses formal yang melibatkan beberapa pihak, termasuk sekolah dan dinas pendidikan. Namun, sistem zonasi yang diatur sedemikian rupa sering kali menimbulkan permasalahan, terutama bagi sekolah yang kebetulan berada di dekat zona sekolah-sekolah favorit. Misalnya, jika suatu daerah atau kelurahan berada dalam zona yang beririsan dengan sekolah favorit seperti SMP 13 atau SMP 3, maka siswa di daerah tersebut biasanya akan memilih mendaftar di sekolah favorit tersebut. Alasannya jelas yakni karena orang tua dan siswa cenderung memilih sekolah yang dianggap memiliki reputasi lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, serta lingkungan belajar yang dianggap lebih kondusif. Hal ini berdampak pada sekolah lain di dalam zona yang sama tetapi tidak memiliki reputasi "sekolah favorit," sehingga banyak siswa yang enggan memilih sekolah-sekolah tersebut.

Contohnya di SMPN 3 Mataram, yang meskipun berada di dalam zona yang sama dengan beberapa sekolah favorit, namun bukan merupakan sekolah favorit. Karena itu, banyak siswa yang lebih memilih untuk mendaftar ke sekolah-sekolah favorit meskipun

jaraknya lebih jauh atau meski berada di luar zona. Sekolah ini beririsan dengan SMP 18, namun karena sekolah tersebut bukan pilihan utama, akhirnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah ini sangat sedikit. Bahkan, ada kelas yang hanya terisi sekitar 10 hingga 13 siswa dalam satu tahun ajaran, jumlah yang jauh dari ideal. Padahal, secara geografis, SMP 18 berada di dalam zona yang sama dengan sekolah-sekolah favorit lain seperti SMP 13 dan SMP 3. Namun, karena siswa lebih tertarik untuk mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut, sehingga SMP 18 mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan siswa baru.



Gambar 3. SMPN 3 Mataram

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan sekolah favorit masih mempengaruhi minat siswa dalam memilih sekolah, meskipun telah ada kebijakan zonasi. Selain itu, perbedaan fasilitas, kualitas pengajaran, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu juga masih sangat memengaruhi minat pendaftar. Akibatnya, sekolah yang kurang diminati menjadi sulit berkembang, sementara sekolah favorit cenderung terus dipenuhi oleh siswa.

Sebagai ilustrasi, target penerimaan siswa baru di SMP 3 adalah sebanyak 6 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas maksimal 32 siswa per kelas. Total target penerimaan siswa seharusnya mencapai 192 siswa. Namun, pada penerimaan tahun lalu, SMP 3 hanya berhasil mendapatkan sekitar 100 siswa, sehingga terdapat kekurangan sekitar 90 siswa dari target awal. Kekurangan ini juga merupakan dampak dari kebijakan zonasi yang membatasi siswa untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka, dan sebagai akibatnya, tidak semua siswa di zona yang sama memiliki minat untuk masuk ke sekolah-sekolah yang tidak populer atau yang dianggap kurang memiliki reputasi baik. Pada akhirnya, kebijakan zonasi ini masih perlu disempurnakan agar dapat lebih efektif dan merata dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa tanpa menimbulkan masalah ketimpangan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan zonasi membawa dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMPN 3 Mataram. Secara umum, kebijakan ini berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan dengan mendorong keberagaman latar belakang siswa, baik dari segi akademik maupun sosial ekonomi. Namun, beberapa tantangan juga muncul, seperti perbedaan tingkat kompetensi siswa yang masuk melalui sistem zonasi, yang memengaruhi dinamika pembelajaran di kelas. Penerapan zonasi juga mendorong peningkatan kapasitas guru dan sekolah dalam menghadapi heterogenitas siswa. Sekolah dituntut untuk mengadaptasi strategi pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi memiliki potensi positif dalam menciptakan keadilan pendidikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan implementasi

dan dukungan kebijakan yang menyeluruh. Meski demikian, kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah dan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Launuha, J., Armin Naway, F., & Suling, A. (2021). Implementasi Sistem Zonasi. *Student Journal of Educational Management*, 1, 182–193. <https://doi.org/10.37411/sjem.v1i2.945>
- Liska, L., Ruhyanto, A., & Yanti, R. A. E. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 161. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v2i3.6156>
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Pangestuti, A. (2021). Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. 2(1), 15–21.
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak sistem zonasi bagi sekolah menengah pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18.
- Wahyuni, Y. S. D., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2020). Strategi manajemen sekolah dalam menghadapi pemberlakuan sistem zonasi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 124–136. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31858>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- Yonantias, N. (2019). MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG ADIL DAN MERATA DI INDONESIA Novianta Yonantias Universitas Negeri Padang Abstrak. Univeritas Negeri Padang. <https://osf.io/preprints/s3ykc/>